



**“(Tema: 2 (pengelolaan wilayah kelautan, pesisir dan pedalaman))**

## **INSTRUMEN EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI SELATAN JAWA**

Oleh

**Hakim Miftakhul Huda, Mira, Maulana Firdaus**  
**Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ancol Timur, Jakarta**  
**hamihud@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik instrumen ekonomi dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan di selatan Pulau Jawa. Analisis data dilakukan secara deskriptif menjelaskan kondisi potensi sumber daya perikanan dan praktik instrumen ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Selatan Pulau Jawa mempunyai potensi perikanan khususnya dari komoditas ikan demersal, pelagis kecil dan pelagis besar. Potensi sumber daya manusia, armada dan alat tangkap yang ada harus dikelola dengan hati-hati agar pemanfaatan sumber daya perikanan berkelanjutan. Implementasi instrumen ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap saat ini masih sebatas pemberian izin usaha yang belum mempunyai hubungan langsung dengan besarnya produksi atau nilai produksi sumberdaya ikan yang diekstraksi. Perumusan besarnya nilai instrumen ekonomi berdasarkan produksi maupun nilai produksi perikanan yang diekstraksi diharapkan dapat diformulasikan dengan memperhatikan azas keadilan dan keberlanjutan usaha.

Kata kunci : *instrumen ekonomi, selatan Pulau Jawa, perikanan*

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the practice of economic instruments in supporting the management of fisheries resources in southern Java. Data analysis was performed descriptively explaining the potential condition of fisheries resources and the practice of economic instruments in the utilization of fisheries resources. South of Java Island has fisheries potential especially from demersal fish, small pelagic and large pelagic commodities. The potential of existing human resources, fleets and fishing gear must be manage carefully so that the utilization of fisheries resources is sustainable. The current implementation of economic instruments in the utilization of capture fisheries resources is still limited to granting business licenses that do not yet have a direct relationship with the total production or production value of extracted fish resources. The formulation of the magnitude of the value of economic instruments based on production and the value of extracted fisheries production is expected to be formulated by taking into account the principles of justice and business sustainability.

Keywords: *economic instruments, south of Java, fisheries*



## **PENDAHULUAN**

Permintaan kebutuhan ikan yang terus meningkat mendorong terjadinya pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak bertanggung jawab dikhawatirkan dapat memberikan eksternalitas lingkungan yang bersifat negatif. Eksternalitas negatif yang ditimbulkan secara ekstrim dapat berupa musnahnya komoditas ikan tertentu (Berkes, et al., 2001 dan Cunningham, 2005). Pengaturan yang banyak diterapkan dalam mengelola sumberdaya perikanan adalah mengelola kapasitas penangkapan dan upaya penangkapan.

Pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia dikelola dalam kelembagaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Status pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap antar WPP juga mengalami variasi, sebagian WPP dapat dikategorikan mengalami *over fishing*, sedangkan beberapa WPP yang lain masih berada pada kondisi *under fishing* maupun mendekati *over fishing*. Kondisi ini menuntut diperlukannya strategi pengelolaan yang tepat agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Kegiatan perikanan tangkap dihadapkan pada permasalahan sistem tata kelola yang masih bersifat "open acces" walaupun sudah ada mekanisme perijinan, selain itu dominasi kapal kecil menyebabkan tekanan yang tinggi pada daerah perairan pantai yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Praktik illegal fishing di perairan lepas pantai wilayah Indonesia juga menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas, 2014).

Instrumen ekonomi pada dasarnya adalah instrumen yang dirancang untuk mempengaruhi proses produksi dan konsumsi melalui mekanisme harga atau dengan cara mengubah ketertarikan ekonomi terhadap tindakan-tindakan tertentu. Instrumen ekonomi berfungsi untuk mengukuhkan, memperbaiki dan memperjelas hak pemilikan, menjamin pengguna sumberdaya membayar sesuai yang dikonsumsi dan dapat menjadi subsidi bagi alternatif teknologi yang ramah lingkungan serta dapat membangkitkan penerimaan keuangan daerah (Rahmani, 2013). Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik instrumen ekonomi dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan di selatan Pulau Jawa.



## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder dan diperkuat dengan survei lapang di Kab. Cilacap dan Kab. Sukabumi sebagai sentra perikanan utama di pantai selatan Jawa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif menjelaskan kondisi potensi sumber daya perikanan dan praktik instrumen ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sumber daya perikanan di selatan Pulau Jawa merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan 573 yang terdiri dari perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. Khusus untuk kategori selatan Pulau Jawa meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Jumlah armada penangkapan ikan di selatan Pulau Jawa didominasi dengan perahu motor tempel yang mencapai 51% dari total armada penangkapan ikan. Berdasarkan ukuran armada penangkapan ikan, kapal dengan ukuran kurang dari 10 GT mendominasi dengan jumlah 10.685 unit (75%), diikuti dengan kapal diatas 30 GT sebanyak 2.626 unit (18%) dan kapal antara 10-30 GT sebanyak 935 unit (7%).

Tabel 1. Jumlah armada penangkapan ikan di selatan Pulau Jawa tahun 2016

Kelompok armada penangkapan	Jumlah armada (unit)	Persentase (%)
Perahu Tanpa Motor	3.915	27,14
Perahu Motor Tempel ( <i>outboard</i> )	7.431	51,51
▪ <5 GT	4.672	32,39
▪ 5-10 GT	22	0,15
▪ 10-20 GT	98	0,68
▪ 20-30 GT	88	0,61
▪ > 30 GT	2551	17,68
Perahu Motor ( <i>inboard</i> )	3.080	21,35
▪ <5 GT	1.415	9,81
▪ 5-10 GT	841	5,83
▪ 10-20 GT	599	4,15
▪ 20-30 GT	150	1,04
▪ 30-50 GT	28	0,19



**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"  
19-20 November 2019  
Purwokerto

▪ 50-100 GT	39	0,27
▪ 100-200 GT	8	0,06
Jumlah	14.426	100,00

Sumber : KKP, 2017

Karakteristik alat tangkap yang digunakan nelayan identik dengan komoditas ikan yang ditangkap dan produktivitas alat tangkap. Alat tangkap yang banyak digunakan di selatan Pulau Jawa didominasi dengan jaring lingkaran yang mencapai 39.137 unit (34%). Jumlah alat tangkap ikan di selatan Pulau Jawa pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah alat tangkap ikan di selatan Pulau Jawa tahun 2016

Jenis Alat Tangkap		Jumlah (unit)	Persentase (%)
Jaring Lingkaran	Jaring lingkaran bertali kerut ( <i>With purse lines/Purse seine</i> )	39.137	34,06
Pukat Tarik	Pukat tarik pantai ( <i>Beach seines</i> )	1.563	1,36
	Payang ( <i>pair seines</i> )	2.624	2,28
	Dogol ( <i>Danish seines</i> )	887	0,77
	Cantrang ( <i>Cantrang</i> )	251	0,22
Pukat Hela	Pukat hela dasar udang	19.347	16,84
	Pukat hela pertengahan berpapan	291	0,25
	Pukat dorong ( <i>pukat dorong</i> )	112	0,10
Penggaruk	Penggaruk berkapal ( <i>Boat dredges</i> )	332	0,29
	Penggaruk tanpa kapal ( <i>Hand dredges</i> )	715	0,62
Jaring Angkat	Anco ( <i>Portable lift nets</i> )	605	0,53
	Bagan berperahu ( <i>bagan berperahu</i> )	1.523	1,33
	Bouke ami ( <i>Bouke ami</i> )	14	0,01
	Bagan tancap ( <i>Shore-operated stationary lift nets</i> )	1.523	1,33
Alat yang dijatuhkan	Jala jatuh	184	0,16
	Jala tebar	655	0,57
Jaring Insang	Jaring insang tetap	7.711	6,71
	Jaring insang hanyut	9.743	8,48
	Jaring insang lingkaran	236	0,21
	Jaring insang berlapis	547	0,48
	Combined gillnets-trammel nets	5.468	4,76
Perangkap	<i>Stationary uncovered pound nets</i>	1.885	1,64
	Bubu ( <i>Pots</i> )	2.470	2,15



**Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"  
19-20 November 2019  
Purwokerto

	Bubu bersayap ( <i>Fyke nets</i> )	248	0,22
	Jermal ( <i>Jermal</i> )	1.056	0,92
	Pengerih ( <i>Pengerih</i> )	18	0,02
	Muro ami ( <i>Muro Ami</i> )	7	0,01
	Seser ( <i>Seser</i> )	706	0,61
Pancing	Pancing ulur ( <i>Hand lines</i> )	7.296	6,35
	Pancing berjoran ( <i>Pole-lines with stick</i> )	209	0,18
	Huhate ( <i>Pole and lines</i> )	4	0,00
	Squid angling ( <i>Squid angling</i> )	13	0,01
	Rawai dasar ( <i>Set long lines</i> )	6.555	5,70
	Rawai tuna ( <i>Tuna long line</i> )	470	0,41
	Rawai cucut ( <i>Sharks long line</i> )	244	0,21
	Tonda ( <i>Trolling lines</i> )	203	0,18
	Pancing layang-layang ( <i>Other hooks and lines</i> )	17	0,01
Alat Penjepit dan Melukai	Tombak ( <i>Harpoons</i> )	39	0,03
	Panah ( <i>Panah</i> )	2	0,00
Jumlah		114.910	100,00

Sumber : KKP, 2017

Jumlah nelayan di selatan Pulau Jawa pada tahun 2016 mencapai 106.045 orang. Jumlah nelayan di Jawa Timur merupakan yang terbesar diantara provinsi yang lain di Jawa yaitu mencapai 63.554 orang atau 60%. Jumlah nelayan di selatan Pulau Jawa tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah nelayan di selatan Pulau Jawa Tahun 2016

Kategori	Jumlah (Orang)					
	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Selatan Jawa
Nelayan penuh	9.369	7.352	5.209	625	45.505	68.061
Nelayan sambilan utama	2.200	1.727	9.902	798	13.981	28.608
Nelayan sambilan tambahan	679	533	4.006	90	4.068	9.376
Jumlah	12.248	9.612	19.117	1.513	63.554	106.045

Sumber : KKP, 2017

Besarnya jumlah nelayan pada satu sisi sebagai modal dalam rangka pemenuhan jumlah produksi perikanan, namun disisi yang lain dapat menjadi ancaman dalam



keberlanjutan sumber daya ikan jika tidak dikelola dengan baik. Pada tahun 20016, produktivitas nelayan di Selatan Jawa mencapai 1,38 ton ikan per orang per tahun.

Tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan di selatan Pulau Jawa pada tahun 2016 mencapai 146.500 ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 2,8 trilyun. Kontribusi produksi ikan di selatan Pulau Jawa terutama dari kelompok ikan demersal, pelagis besar dan pelagis kecil. Besaran produksi dan nilai produksi perikanan di selatan Pulau Jawa tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Produksi dan nilai produksi perikanan di selatan Pulau Jawa tahun 2016

Kelompok Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.000)
Pelagis kecil	35.686	445.831.041
Pelagis besar	41.183	847.334.287
Demersal	47.669	785.656.363
Ikan karang	4.664	99.747.263
Binatang berkulit keras	8.127	427.500.637
Binatang lunak	8.232	212.339.826
Binatang air lainnya	503	7.036.401
Tumbuhan air	436	860.094
Total	146.500	2.826.305.912

Sumber : KKP, 2017

Praktik instrumen ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap laut saat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu kelompok nelayan kecil (armada penangkapan ikan kurang dari 10 GT), armada penangkapan ikan 10-30 GT dan armada penangkapan ikan diatas 30 GT. Untuk nelayan kecil dengan ukuran armada kurang dari 10 GT tidak dikenakan pungutan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, sedangkan untuk kelompok armada penangkapan ikan ukuran 10-30 GT tergantung kebijakan pada pemerintah provinsi. Adapun untuk kategori armada diatas 30 GT mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang saat ini merujuk pada PP 75 tahun 2015 tentang PNBP Kelautan dan Perikanan.

Salah satu bentuk instrumen ekonomi yang berkembang di Selatan Jawa adalah izin penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Besaran tarif yang ditentukan masing-masing provinsi tidak sama. Pada umumnya besaran tarif ditentukan



berdasarkan ukuran armada dan jenis alat tangkap ikan yang digunakan. Hasil identifikasi instrumen ekonomi pada provinsi di selatan Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Contoh implementasi instrumen ekonomi terkait sumber daya perikanan tangkap di Provinsi Selatan Jawa

No	Provinsi	Dasar peraturan	Keterangan
1	Banten	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018	Tarif SIPI berkisar antara Rp.37.000 sampai dengan Rp.85.000 per GT/ tahun tergantung jenis alat tangkap
2	Jawa Barat	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2014	Tarif SIPI berkisar antara Rp.15.000 sampai dengan Rp.25.000 per GT/2 tahun tergantung jenis alat tangkap
3	Jawa Tengah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017	Tarif SIPI berkisar antara Rp.10.000 sampai dengan Rp.100.000 per GT/tahun tergantung alat tangkap
4	DIY	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011	Tarif SIPI berdasarkan kategori kelas ukuran dan jenis alat tangkap berkisar antara Rp.25.000 sampai dengan Rp.100.000 per armada per tahun
5	Jawa Timur	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2010	Pengurusan SIUP, SIPI dan SIKPI bebas biaya

Perbedaan tarif dalam pemanfaatan sumber daya ikan baik antar provinsi maupun antar kategori nelayan berpotensi dalam mendorong tingkat upaya penangkapan ikan. Tarif yang rendah atau bahkan gratis akan mendorong tingginya laju pertumbuhan penangkapan ikan. Kondisi sebaliknya bisa terjadi jika tarif yang dikenakan tinggi akan berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan usaha penangkapan ikan.

Pemanfaatan sumber daya ikan saat ini tidak dikenakan pungutan secara langsung. Mekanisme penerapan instrumen ekonomi baru sebatas pemberian izin atau legalitas dalam melakukan usaha penangkapan ikan. Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan maka diperlukan mekanisme pungutan berdasarkan hasil produksi perikanan yang didaratkan. Hasil pungutan produksi perikanan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas yang mendukung usaha nelayan.



## **KESIMPULAN**

Selatan Pulau Jawa mempunyai potensi perikanan khususnya dari komoditas ikan demersal, pelagis kecil dan pelagis besar. Potensi sumber daya manusia, armada dan alat tangkap yang ada harus dikelola dengan hati-hati agar pemanfaatan sumber daya perikanan berkelanjutan. Implementasi instrumen ekonomi saat ini masih sebatas pemberian izin usaha yang belum berhubungan secara langsung dengan besarnya produksi atau nilai produksi sumberdaya ikan yang diekstraksi. Perumusan besarnya nilai instrumen ekonomi berdasarkan produksi maupun nilai produksi perikanan yang diekstraksi diharapkan dapat diformulasikan dengan memperhatikan azas keadilan dan keberlanjutan usaha.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP-Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah membiayai kegiatan penelitian Model Penerapan Instrumen Ekonomi dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2019. Terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr Sonny Koeshendrajana, Dr Siti Hajar Suryawati yang memberikan arahan dan masukan dalam pelaksanaan penelitian. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh tim peneliti dan narasumber kegiatan selama penelitian ini berlangsung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Berkes, F., R. Mahon, P. McConney, R. Pollnack, & R.Pomeroy, 2001. Managing small-scale fisheries, alternative directions and methods. IDRC. www.idrc.ca. 320 pp.
- Cunningham, S. 2005. Successful fisheries management, Issues, Case Studies, and Perspectives. Science 22 June 2007: 316. (5832). 1713 – 1716.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP]. 2017. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Menurut Provinsi, 2016. Jakarta. 326 hal.
- Rahmani, U. 2013. Instrumen Ekonomi Untuk Keberlanjutan Perikanan Budidaya Di Waduk. Jurnal Ilmiah Universitas Satya Negara Indonesia 6 (2): 51 – 56